

Judul : Banyak WNA bermasalah, komisi XIII sarankan perkuat pengawasan
Tanggal : Selasa, 21 April 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Banyak WNA Bermasalah Komisi XIII Sarankan Perkuat Pengawasan



Prana Putra Sohe

ANGGOTA Komisi XIII DPR Prana Putra Sohe memuji langkah proaktif aparat imigrasi melalui Operasi Wira Waspada dalam menjaring WNA bermasalah. Namun, upaya tersebut tidak boleh berhenti pada pola penindakan semata.

Karena, temuan WNA bermasalah menunjukkan pengawasan masih belum sistemik, terintegrasi, dan cenderung reaktif. "Kita membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan," ujar Prana di Jakarta, Minggu (19/4/2026).

Diketahui, Operasi Wira Waspada 2026 digelar pada 7-11 April 2026 melibatkan 151 satuan kerja (satker) keimigrasian di seluruh Indonesia. Hasilnya, sebanyak 346 WNA berhasil diamankan karena terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian. Mulai dari penyalahgunaan izin tinggal, *overstay*, hingga keberadaan investor fiktif yang merugikan iklim investasi.

Menurutnya, pengawasan terhadap WNA selama ini masih berjalan secara sektoral dan administratif. Data antar lembaga seperti imigrasi, kepolisian, Pemerintah Daerah (Pemda), dan Kementerian terkait belum sepenuhnya terhubung secara real-time. Aki-

batnya, deteksi dini terhadap potensi pelanggaran seringkali terlambat.

Selain itu, kapasitas pengawasan di daerah masih menghadapi keterbatasan, baik dari sisi sumber daya manusia (SDM) maupun dukungan teknologi. Hal ini diperparah dengan belum maksimalnya pelibatan masyarakat dalam sistem pengawasan.

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap WNA, Prana mendorong sejumlah langkah strategis. Antara lain, pengawasan terhadap WNA harus melibatkan sinergi aktif antara imigrasi, kepolisian, Pemda, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), hingga aparat desa/kelurahan. Kolaborasi lintas sektor ini penting untuk memastikan pengawasan berjalan menyeluruh dari pusat hingga daerah.

Ia juga mendorong Pemerintah segera membangun sistem terpadu berbasis digital yang menghubungkan data antarinstansi secara real-time. Tujuannya untuk mempercepat deteksi dan respons terhadap pelanggaran.

"Pemerintah juga melakukan profiling risiko terhadap WNA sejak tahap pengajuan visa, termasuk memperketat verifikasi sponsor dan tujuan kedatangan," tegas politikus PKB ini.

Prana mengatakan, Indonesia harus tetap terbuka bagi WNA yang memberikan kontribusi positif. Tapi pengawasan yang kuat tetap menjadi kunci dalam menjaga kedaulatan hukum dan keamanan nasional. Karena itu, kolaborasi lintas sektor adalah kunci. Tanpa itu, pengawasan akan selalu berjalan parsial dan tidak efektif.

"Kita harus bergerak bersama untuk memastikan setiap WNA yang berada di Indonesia patuh terhadap hukum yang berlaku," tandasnya. ■ TIF